

Daftar Pustaka

- Djoko Susilo. 2005. *Good Governance* Melalui Implementasi SAKIP, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta.
- Hughes, O. E. 1998. *Public Management and Administration: An Introduction*, Australia: McMillan Press Ltd.
- Indonesia. *Peraturan Perundangan*. tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Keuangan Negara. UU No. 17 Tahun 2003.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU No. 25 Tahun 2004.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004, LN No 125 Tahun 2004, TLN No. 4437.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara. UU No.1 Tahun 2004.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 5 Tahun 2004.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP No 105 Tahun 2000.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. PP No 108 Tahun 2000.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No 58 Tahun 2005.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP No 8 Tahun 2006.
- Indonesia. Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Perpres No 9 Tahun 2005.
- Indonesia. Instruksi Presiden tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres No. 7 Tahun 1999.
- Indonesia. Instruksi Presiden tentang Penyusunan Penetapan Kinerja. Inpres No. 5 Tahun 2004.

Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No 13 Tahun 2006.

Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi LAKIP. Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2012.

Indonesia. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kep. Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003.

Indonesia. Lembaga Administrasi Negara. Modul: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Edisi Kedua), Jakarta. 2004.